

## PELATIHAN PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MELALUI KONSEP *SMART VILLAGE GOVERNMENT* DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA

**Alva Beriansyah, Rio Yusri Maulana**

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi

Email: [alvaberiansyah@unja.ac.id](mailto:alvaberiansyah@unja.ac.id), [rioyusrimaulana@unja.ac.id](mailto:rioyusrimaulana@unja.ac.id)

Diterima 30 Juli 2020/Disetujui 3 September 2020

### ABSTRAK

Kegiatan PKM berupa pelatihan penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui konsep *smart village government* di Kec. Jambi Luar Kota bertujuan untuk: 1) meningkatkan kesadaran pemerintah desa tentang pentingnya tata kelola pemerintahan desa dengan konsep *smart village government*; 2) meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang paradigma terbaru tata kelola pemerintahan desa di era 4.0; 3) meningkatkan pengetahuan pemerintah desa dan terbukanya pemikiran pemerintah desa untuk menerapkan konsep *smart village government* dalam pengelolaan pemerintahan desa; dan 4) tercapainya tata kelola pemerintahan yang optimal berbasis teknologi informasi. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilakukan melalui metode pelatihan dengan penyampaian materi pelatihan menggunakan metode yang relevan, yakni ceramah, tanya jawab dan diskusi. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatannya, yaitu survei lapangan, pelatihan, diskusi dan evaluasi. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM berupa pelatihan penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui konsep *smart village government* di Kec. Jambi Luar Kota, disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan diikuti dengan antusias oleh peserta, terlihat dari semangat dan keseriusannya dalam mengikuti pelatihan. Sehingga, kesiapan yang matang dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* menjadikan kegiatan ini berjalan dengan baik. Adapun capaian kegiatan pelatihan adalah meningkatnya pemahaman kepala desa tentang strategis letak desa yang dipimpin dan memahami konsep tata kelola pemerintahan yang tepat agar dapat memanfaatkan letak strategis desa dengan penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa atau konsep *smart village government*. Maka, kegiatan pelatihan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik di desa dalam Kec. Jambi Luar Kota.

**Kata Kunci:** *pelatihan, penguatan tata kelola pemerintahan desa, smart village goverment*

### PENDAHULUAN

Desa yang ada di Kec. Jambi Luar Kota terletak dipinggiran Kota Jambi dan menjadi desa penyangga daerah perkotaan. Sehingga, menjadikan desa yang ada di Kec. Jambi Luar Kota memiliki infrastuktur memadai untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Namun, posisi strategis dan infrastruktur yang memadai belum dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintahan desa di Kec. Jambi Luar Kota dalam tata kelola pemerintahan desa.

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berdampak pada pergeseran paradigma tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Desa yang selama ini hanya menjadi obyek pemerintahan di atasnya, setelah lahir UU ini menempatkan desa sebagai subyek dan dapat menentukan arah pembangunannya sendiri. Hal ini didukung dengan perubahan kepastian sumber pendapatan yang tidak hanya bersumber dari APBD dan pendapatan asli daerah tetapi dari APBN. Melalui perubahan paradigma diharapkan desa di Indonesia menjadi desa yang mandiri dan kuat. Desa yang mandiri adalah desa yang berdaulat secara politik dan desa yang kuat adalah desa yang dapat mengurus dan mengatur kepentingannya sendiri dan memiliki kapasitas. Hadirnya desa yang kuat dan mandiri dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kekuatan anggaran menjadi salah satu unsur perubahan paradigma dalam UU tentang desa. Kekuatan anggaran yang dimiliki pemerintahan desa menuntut pemerintahan desa dengan serius

mewujudkan desa yang kuat dan mandiri. Cita-cita mulia ini tidak akan terwujud tanpa adanya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dengan mengadopsi konsep *smart village government*. Konsep *smart village government* adalah pengembangan dari konsep *smart city* tetapi dalam konteks yang lebih kecil yakni desa. Konsep *smart village government* adalah inovasi penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi serta daya saing dalam aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.

Desa yang ada di Kec. Jambi Luar Kota memiliki peluang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa dengan konsep *smart village government*. Namun, sampai saat ini belum ada desa di Kec. Jambi Luar Kota yang mewujudkan tata kelola pemerintahan desa dengan konsep *smart village government*. Hal ini dikarenakan kepala desa yang ada di Kec. Jambi Luar Kota belum menyadari tentang posisi strategis dan kelebihan infrastruktur yang dimiliki serta lemahnya pemahaman kepala desa tentang strategi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kepala desa yang ada di Kec. Jambi Luar Kota tergabung dalam Forum Kepala Desa Kec. Jambi Luar Kota adalah organisasi yang menaungi pemerintahan desa seluruh Kec. Jambi Luar Kota. Fungsi organisasi ini adalah sebagai saran komunikasi, fasilitas, koordinasi advokasi, mediasi dan sebagai organisasi perjuangan bagi pemerintah desa serta masyarakat desa. Secara keanggotaan, anggota Forum Kepala Desa se Kec. Jambi Luar Kota adalah pemerintah desa seluruh Kec. Jambi Luar Kota yang di ketuai oleh A. Rasyid yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Pematang Jering.

#### **TUJUAN DAN LUARAN**

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKM berupa pelatihan penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui konsep *smart village government* di Kec. Jambi Luar Kota, adalah: 1) meningkatkan kesadaran pemerintah desa tentang pentingnya tata kelola pemerintahan desa dengan konsep *smart village government*; 2) meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang paradigma terbaru tata kelola pemerintahan desa di era 4.0; 3) meningkatkan pengetahuan pemerintah desa dan terbukanya pemikiran pemerintah desa untuk menerapkan konsep *smart village government* dalam pengelolaan pemerintahan desa; dan 4) tercapainya tata kelola pemerintahan yang optimal berbasis teknologi informasi. Adapun target luaran yang dihasilkan dari kegiatan PKM ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada kepala desa dan menciptakan inovasi penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, target luaran kegiatan pelatihan berupa foto dokumentasi kegiatan pelatihan penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui konsep *smart village government* dan hasil kegiatan PKM dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat ber-ISSN atau terindeks, baik cetak maupun online.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan PKM berupa pelatihan penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui konsep *smart village government* dilaksanakan melalui metode pelatihan dengan penyampaian materi pelatihan yang dilaksanakan menggunakan metode yang relevan, yakni metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatannya, yaitu: 1) survei lapangan, untuk mengetahui dan melihat secara langsung kondisi dan keadaan sosial masyarakat dan pemerintahan desa; 2) pelatihan, untuk memberikan materi pengetahuan dan pemahaman tentang konsep *smart village government*; 3) diskusi, untuk memetakan persoalan dan hambatan pemerintahan desa dalam melaksanakan konsep *smart village government*; dan 4) evaluasi, melibatkan kepala desa yang tergabung dalam Forum Kepala Desa Kec. Jambi Luar Kota.

## WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan PKM berupa pelatihan penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui konsep *smart village government* dilaksanakan sejak bulan Maret s.d Agustus 2020 di Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi.

## HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Kegiatan PKM berupa pelatihan penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui konsep *smart village government* di Kec. Jambi Luar Kota diperoleh hasil kegiatan yaitu meningkatnya kesadaran peserta tentang pemanfaatan posisi strategis dan infrastruktur yang memadai sebagai wilayah desa penyangga kota, meningkatnya kesadaran pemerintah desa tentang pentingnya tata kelola pemerintahan desa dengan konsep *smart village government*, meningkatnya pengetahuan pemerintah desa tentang paradigma terbaru tata kelola pemerintahan desa di era 4.0, meningkatnya pengetahuan pemerintah tentang konsep *smart village government*, membuka pemikiran pemerintah desa untuk menerapkan konsep *smart village government* dalam pengelolaan dan tata kelola pemerintahan desa yang lebih optimal berbasis teknologi informasi.

### Diskusi Kelompok Terarah Bersama Pihak Kec. dan Pengurus Forum Kepala Desa Kec. Jambi Luar Kota

Diskusi kelompok dihadiri oleh Bapak Asrizal selaku Camat Kec. Jambi Luar Kota, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kec. Jambi Luar Kota Bapak A. Rasyid yang juga Kepala Desa Pamatang Jering dan tim pengabdian. Diskusi kelompok bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang pemahaman posisi strategis dan infrastruktur yang memadai sebagai wilayah desa penyangga kota yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemahaman, opini tentang konsep tata kelola pemerintahan desa dengan konsep *smart village government* yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Adapun hasil yang diperoleh dari diskusi dijadikan acuan penyusunan materi pada sesi pelatihan. Sehingga, materi yang disampaikan dalam pelatihan tidak jauh dari konteks, dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.



Gambar 1. Diskusi Bersama Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Se Kecamatan Jambi Luar Kota

Dari hasil diskusi awal, diketahui bahwa pihak kec. dan Forum Komunikasi Kepala Desa Kec. Jambi Luar Kota sangat memahami posisi strategis Kec. Jambi Luar Kota sebagai kec. penyangga perkotaan. Namun, pemahaman tersebut belum dimanfaatkan dengan baik karena kurangnya pemahaman kepala desa tentang cara mengelola posisi strategis tersebut. Hal ini dikarenakan lemahnya pemahaman kepala desa tentang konsep tata kelola pemerintahan desa, serta kurangnya kesiapan pemerintah desa melakukan perubahan terhadap tata kelola pemerintahan selama ini.

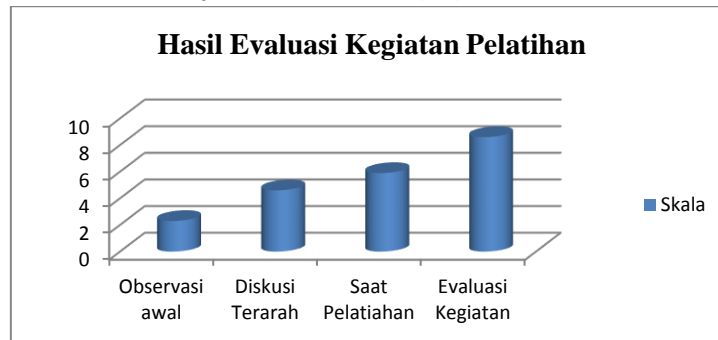


Gambar 2. Diskusi Bersama Camat Kecamatan Jambi Luar Kota

## Pelatihan dan Diskusi

1. Tingkat Kesadaran Kepala Desa tentang Posisi Strategis Desa sebagai Penyangga Perkotaan  
Penyampaian materi dalam kegiatan ini terbagi menjadi 3 sesi, yaitu: 1) penyampaian materi tentang posisi strategis desa di Kec. Jambi Luar Kota sebagai desa penyangga kota; 2) penyampaian yang bersifat teoritis tentang konsep *smart village governance*, dan 3) wawancara serta pengisian angket kuisisioner. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah ceramah dan dilanjutkan dengan diskusi, serta yang bertindak sebagai pemateri dalam kegiatan ini adalah Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi dan sebagai ahli dalam bidang *smart city* serta tim pengabdian.

Berdasarkan hasil pelatihan, terlihat adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan peserta kegiatan setelah penyampaian materi oleh pemateri. Kegiatan pelatihan disambut antusias oleh peserta pelatihan. Hal ini terlihat dari wajah antusiasme peserta dan keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara dan isi kuesioner dengan peserta mengenai tanggapan atas terselenggaranya kegiatan pelatihan ini, diperoleh bahwa: 1) materi pelatihan yang disampaikan oleh tim ahli dan tim pengabdian sangat menarik dan peserta mendapatkan wawasan tambahan tentang posisi strategis desa yang dipimpin dan cara memanfaatkan posisi strategis tersebut; 2) materi sosialisasi dan pelatihan yang disampaikan membuka wawasan peserta tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa; dan 3) kegiatan pelatihan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik jika diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan desa yang dipimpin, sehingga peserta berharap adanya kerja sama dan bimbingan lanjutan untuk mewujudkan *smart village governance*.



2. Pemahaman Kepala Desa tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa

Pengambilan data tentang tingkat pemahaman kepala desa tentang pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa dilakukan sebelum berlangsungnya kegiatan pelatihan, dengan memberikan beberapa pertanyaan berikut: 1) bisa tidak teknologi informasi digunakan dalam tata kelola pemerintahan desa; 2) pernah tidak mencoba memanfaatkan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa; 3) dapat tidak penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan desa meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pemerintahan desa. Setelah diamati oleh tim pengabdian, terlihat bahwa masih banyak kepala desa yang belum memahami pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa.

Adapun hasil evaluasi setelah kegiatan pelatihan dilakukan, berdasarkan penyebaran kuisisioner dan pengamatan tim pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman kepala desa tentang posisi strategis desa yang ada di Kec. Jambi Luar Kota dan mulai memahami strategi memanfaatkan posisi strategis tersebut agar dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pemerintahan desa dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan atau disebut dengan *smart village government*.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM berupa pelatihan penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui konsep *smart village government* di Kec. Jambi Luar Kota, disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan diikuti dengan antusias oleh peserta, terlihat dari semangat dan keseriusannya mengikuti pelatihan. Sehingga, kesiapan yang matang dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* menjadikan kegiatan ini berjalan baik. Adapun capaian kegiatan pelatihan adalah meningkatnya pemahaman kepala desa tentang strategis letak desa yang dipimpin dan memahami konsep tata kelola pemerintahan yang tepat agar dapat memanfaatkan letak strategis desa menggunakan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa atau konsep *smart village government*. Maka, kegiatan pelatihan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik di desa dalam Kec. Jambi Luar Kota. Adapun saran yang disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah hendaknya kepala desa tidak hanya memahami konsep tata kelola pemerintahan *smart village government* tetapi berkomitmen mengimplementasikan konsep tersebut.

## REFERENSI

- Agus, Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Geovernance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Dennis, Anderson., dkk. 2015. *E-Government Strategy, ICT and Innovation for Citizen Engagement*. New York: Springer.
- Gasco-Hernandez, Mila. 2014. *Open Government: Opportunities and Challanges for Public Governance*, New York: Springer.
- Hari, Sabarno. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendytio, Medelina., dkk. 2014. *Mengkaji Kebijakan tentang Akses dan Informasi serta Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi: Belajar dari Singapura dan Filipina serta Rekomendasi Awal untuk DPR (CSIS Research)*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
- Krina, L.P.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lathrop, Daniel., Ruma, Laurel. 2010. *Open Government: Collaboration, Transparency and Participation in Practice*. California: O'Reilly Media.
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. *Sekilas Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-Unpad.
- Retna, Chitra S. 2013. *Independent Reporting Mechanism 2011-2013: Indonesia Progress Report*. Washington DC: IRM Open Government Partnership.
- Rianto, Budi., Tri Lestari. 2012. *Polri dan Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik*. Surabaya: Putra Media Nusantara (PMN).
- Sekretariat OGI. 2013. *OGI Self-Assessment Report Tahun 2012*. Jakarta: UKP-PPP.
- \_\_\_\_\_. 2014. *OGI Self-Assessment Report Tahun 2013*. Jakarta: UKP-PPP.
- Schwarze, R. 2005. *E-development: From Excitement to Effictiveness*. Washington.
- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*, ditetapkan pada 30 April 2008.
- UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*, ditetapkan pada 18 Juli 2009.